

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun dan Judul)	Variabel	Metode	Hasil
1	Desi Kartika Sari (2011) “ Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba “	Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris, X2 : Kepemilikan institusional, X3 : Kepemilikan manajerial Variabel Dependen : Y: Manajemen Laba	Kuantitatif	Proporsi dewan komisaris, Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial , profitabilitas, leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Dwi Metta Karuniasih (2013) “ Pengaruh	Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris, X2 : Kepemilikan institusional,	Kuantitatif	kepemilikan manajerial berpengaruh

	<p><i>Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan</i></p>	<p>X3 : Kepemilikan manajerial</p> <p>Variabel Dependen : Y: Manajemen Laba</p>		<p>uh terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan keberadaan Top Share tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
3	<p>Hikmah Is'ada Rahmawati (2013) “ Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan</i>”</p>	<p>Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris, X2 : Kepemilikan institusional, X3 : Kepemilikan manajerial</p> <p>Variabel Dependen : Y: Manajemen Laba</p>	Kuantitatif	<p>mekanisme good corporate governance yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris</p>

				independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
4	Izzati Amperaningrum dan Intan Komala Sari (2013) “ Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba</i> “ (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)	Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris, X2 : Kepemilikan institusional X3 : Kepemilikan manajerial Variabel Dependen : Y :Manajemen Laba	Kuantitatif	variabel good corporate governance, leverage, dan kinerja keuangan yang mempunyai hubungan yang negatif terhadap manajemen laba, hasil.
5	Marihot Nasution dan Dody Setiawan (2007) “ Pengaruh <i>Good corporate governance Terhadap</i>	Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris X2 : Kepemilikan institusional X3 : Kepemilikan manajerial Variabel Dependen : Y :Manajemen Laba	Kuantitatif	komposisi dan ukuran dewan komisaris, serta Keberadaan komite audit

	Manajemen Laba Di Industri Perbankan“			mempengaruhi manajemen laba perusahaan bank
6	R. Anastasia Endang Susilawati & Nanang Purwanto (2016) “Pengaruh <i>Good corporate governance</i> , <i>leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perbankan Yang Terdaftar di BEI“	Variabel Independen X1 : Dewan komisaris independen, X2 : Komite audit X3 : <i>Leverage</i> X4 : ukuran perusahaan Variabel Dependen : Y :Manajemen Laba	Kuantitatif	Secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapi ukuran komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan kelima variable tersebut tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
	Carina Heurestica Asparagina Paradisea (Variabel Independen : X1 :Dewan komisaris X2 : Kepemilikan institusional	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji individu, menunjukkan bahwa

	2017) “ <i>Good corporate governance on the earnings management using ISO9001 as a moderating variable in banking industry in indonesia</i> “	X3 : Kepemilikan manajerial Variabel Dependen : Y :Manajemen Laba		GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan diperkuat dengan ISO 9001.
--	---	---	--	--

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian –penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen manajemen laba. Sedangkan yang membedakan yaitu variabel independen, sektor perusahaan dan tahun penelitian yang akan menjadi sample.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theori)

Menurut Jensen dan Mecking (1976). Teori keagenan merupakan sebuah hubungan keagenan yang berlangsung saat satu orang atau lebih (*agen*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk membagikan layanan dan akhirnya mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan adalah akar yang dipakai untuk memahami *Good corporate governance* serta ikatan kontraktual di antara anggota dalam perusahaan. Prinsipal merupakan investor atau pemegang saham sedangkan agen merupakan manajemen yang melakukan pengelolaan pada perusahaan. hakikat dari hubungan keagenan yaitu pemisahan manfaat di antara kepemilikan pada investor dan dominasi di pihak manajemen.

Konflik keagenan antara prinsipal dengan agen timbul akibat adanya pemisahan kekuasaan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pengelola oleh manajemen (*agent*). Hantaman kepentingan antara pemilik dengan agen yang berlangsung kemungkinan karena agen tidak selalu melaksanakan sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga timbul adanya

biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan merupakan dana yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk dana pengawasan agen, pengeluaran mengikat agen, dan sisa kerugian. Kerugian residual merupakan mencuatnya nilai uang ketidakberesan kebijakan yang diambil oleh agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal mengakibatkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan pada prinsipal Jensen dan Meckling (1976).). Prinsipal yang tidak selalu dapat memantau kegiatan manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal dapat mengakibatkan benturan kepentingan. Terkadang data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi pada perusahaan yang sebenarnya. Keadaan tersebut dikenal dengan asimetri informasi . Adanya asimetri informasi tersebut dapat membawa agen untuk memendam beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal untuk mengoptimalkan profit bagi agen. Instansi dapat terdorong untuk mengungkapkan informasi yang tidak konkret kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen

2.2.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usahaperusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.

Salah satu tantangan pertama bagi korporasi adalah untuk mengidentifikasi:

1. Pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas investasi mereka.

2. Karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif, dan keamanan kerja.
3. Pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar.
4. Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat.
5. Regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba diartikan sebagai salah satu masalah keagenan yang diakibatkan oleh kepentingan yang berbeda antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen laba merupakan keikutsertaan pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Manajemen laba dimungkinkan karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Hal tersebut memungkinkan ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham

Manajemen laba (earning management) dilakukan dengan mempermainkan komponen akrual dalam laporan keuangan atau memanipulasi, karena akrual adalah komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang melakukan pencatatan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap seperti contohnya disini, meliputi neraca, laporan laba rugi, adanya laporan perubahan posisi keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain), materi penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Laporan keuangan akan menunjukkan kondisi keuangan sebuah bisnis apakah sesuai dengan yang menargetkan atau tidak.

Manajemen laba terdiri dari beberapa macam yaitu :

1. Taking a bath

Pola taking bath ini digunakan perusahaan dalam kondisi tertekan. Manajer cenderung melaporkan laba yang rendah dengan harapan meningkat dimasa depan.

2. Minimisasi laba

Pola minimisasi ini digunakan ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, untuk mengurangi visibilitasnya manajer melakukan manajemen laba.

3. Maksimisasi laba

Pola maksimisasi ini digunakan ketika manajer menginginkan kenaikan bonus dan saat dihadapkan pada perjanjian hutang yang tinggi dan tidak dapat terbayarkan

4. Perataan laba

Pola perataan laba ini digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Menurut Suyono (2017) terdapat beberapa model pengukuran saat pengukuran manajemen laba, diantaranya :

1. Model Healy

Pengujian manajemen laba ini dilaksanakan dengan melakukan perbandingan rata-rata jumlah akrual pada seluruh pembagian manajemen laba

2. Model DeAngelo

Pengujian manajemen laba ini dilaksanakan dengan cara menghitung perbedaan pertama dalam total akrual, dengan mengasumsikan bahwa perbedaan pertama memiliki nilai 0 (nol) yang di harapkan berdasarkan hipotesis 0 (nol) menyatakan tidak ada manajemen laba

3. Model Jones

Model ini mengusulkan penyederhanaan anggapan bahwa akrual nondiskretioner bersifat konstan. Modelnya mencoba mengendalikan efek perubahan pada lingkungan ekonomi perusahaan terhadap nondiskretioner

4. Model Industri

Dalam model yang disusun oleh Dechow dan Sloan (1991) melakukan penyederhanaan anggapan bahwa akrual non sepanjang waktu. Model ini mengasumsikan bahwa variasi dalam factor penentu akrual nondiskretioner adalah umum dalam semua perusahaan di industry yang sama.

5. Model Modifikasi Jones

Model ini mempertimbangkan versi modeifikasi Model Jones dalam analisis empiris. Model ini di susun untuk menghilangkan kemungkinan dugaan pada Model Jones untuk mengukur diskretioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan.

6. Model Dechow-Dichev

Model ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas akrual dalam laba yang disajikan dalam lapran keuangan. Dalam pengukuran ini didasarkan pada observasi yang menemukan bahwa akrual akan mampu menyesuaikan perkiraan peristiwa yang akan datang

7. Model Kothari

Model ini berupaya menyempurnakan Model Jones yaitu dengan menambahkan return on asses (ROA) dalam mengontrol kinerja dalam menghitung akrual diskretioner

8. Model Stubben

Stubben (2010) mengatakan bahwa model discretionary revenue lebih mampu mengatasi bias dalam mengukur manajemen laba dibandingkan dengan akrual diskretioner . Hal ini dikarenakan model akrual diskretioner banyak mendapat kritik adanya bias dari gangguan kesalahan dalam melakukan estimasi atas diskresi manajer

9. Model Pendekatan Baru

Dechow et al. (2011) mengusulkan pendekatan baru dalam mendeteksi manajemen laba yang juga mampu meningkatkan daya uji dan spesifikasi untuk meminimalisir kesalahan estimasi dari model akrual diskretioner sebelumnya.

Menurut pemaparan diatas mengenai berbagai macam model yang digunakan untuk pengukuran manajemen laba, di dalam penelitian ini menggunakan model Jones Modifikasi. Asumsi penggunaan Model Jones menyatakan jika perubahan di dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba . Hal di berdasar dengan penalaran jika lebih mudah melakukan pengelolaan pendapatan menggunakan penerapan diskresi pada pengakuan pada pendapatan atas penjualan kredit jika dibandingkan pengelolaan pendapatan yang berdasar pada diskresi pada pengakuan pendapatan saat penjualan tunai. Menurut Suyono (2017) Model Jones bisa dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode t

TA_{it} = Total Akrual perusahaan i dalam periode tahun

A_{it-1} = Total asset perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

2.2.3 Good Corporate Governance

Dalam buku *Good Corporate Governance* Tinjauan Etika dalam praktik bisnis Hamdani (2016:20) mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan. The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin sustainability. Definisi ini menunjukkan bahwa corporate governance dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

Menurut KNKG, 2006 (dalam Suri & Dewi, 2018) *Good Corporate Governance* memiliki lima azas yaitu :

1. Transparansi (transparency)

Saat melakukan kegiatan bisnis harus memelihara objektivitas agar perusahaan bisa memberikan informasi yang relevan, akurat dan mudah dimengerti serta bisa diakses bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi. Perusahaan harus menyuguhkan informasi secara transparan bukan hanya sebagai prasyarat bagi peraturan dan undang-undang saja, tapi juga inisiatif pengungkapan informasi juga harus dilaksanakan oleh perusahaan sendiri untuk alat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen

resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Dalam memperoleh kinerja agar berkesinambungan di perlukan suatu akuntabilitas. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara terukur serta tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pemilik perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan yaitu memberikan informasi secara transparan atas kinerja perusahaan

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:

- a) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, 15 serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

e) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah. (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan serta masyarakat untuk mematuhi undang-undang supaya tetap terjaga usaha jangka panjang dan menerima pengakuan good corporate citizen. Dalam mengatur pengelola perusahaan agar tidak berbuat demi kepentingannya pribadi, Corporate Governance digunakan agar pengelola perusahaan bisa bertindak sesuai kepentingan pemilik perusahaan (Oktavia, n.d). Oleh karena itu penelitian ini dalam pengukuran *Good Corporate Governance* menggunakan proksi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial (Suaidah & Utomo, 2018).

Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 16 (Hamdani, 2016 dalam buku GCG: Tinjauan Etika dalam praktik Bisnis)

4. Independence (Kemandirian)

Prinsip Independence Perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, di mana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan penrundang-undangan, tidak saling mendominasi dan melempar tanggungjawab satu ama lain.

5. Fairness (Keadilan dan kewajaran)

Perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan prinsip kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setar dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.2.3.1 Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memegang tanggungjawab atas fungsi control atas implementasi kebijakan direksi (Abdillah et al., 2014). Bagian komisaris independen tidak terafiliasi atas manajemen, pemegang saham dan memiliki keleluasaan dari hubungan bisnis

dan hubungan lain yang dapat berdampak bertindak independen. Dewan komisaris independen menjadi sebagai penyeimbang saat pengambilan keputusan agar para pemegang saham serta pemangku kepentingan dilindungi (Guna & Herawaty, 2010). Hadirnya dewan komisaris pada perusahaan diharapkan mampu meminimalisir masalah keagenan pada direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen dapat diukur dengan cara membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total keseluruhan dari anggota dewan komisaris (Suaidah & Utomo, 2018)

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.2.3.2 Komite Audit

Kep. 29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit mempunyai tugas melakukan pengawasan pada pengelolaan perusahaan, dewan komisaris adalah yang membentuk komite ini (Guna & Herawaty, 2010). Manfaat komite audit dalam perusahaan yaitu, Pertama, melakukan pengawasan pada laporan keuangan dan melaksanakan audit eksternal. Kedua, melakukan pengawasan pada pengelolaan perusahaan. Ketiga, melaksanakan pengawasan pada kualitas laporan keuangan. Proksi komite audit bisa dihitung dari total anggota komite audit (Suaidah & Utomo, 2018),

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite Audit}$$

2.2.3.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang secara individu dimiliki pihak manajemen beserta afiliasinya. Saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat membuat pembatasan perilaku pada manajemen laba oleh manajer (Hardiningsih, 2010)/ Saham yang dimiliki pihak manajerial dapat mencocokkan kepentingan antar pemegang saham dengan manajer. Peningkatan kepemilikan oleh manajerial dapat meminimalisir masalah pada keagenan, sehingga terjadi penekanan tindakan pada manajemen laba (Abdillah et al., 2014). Proksi yang dimiliki oleh manajerial bisa dihitung dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki manajer dengan total saham yang beredar (Suaidah & Utomo, 2018),

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Terdapat 2 faktor penentu yang memegang peranan penting dalam keberhasilan *Good Corporate Governance* yaitu

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan pendorong keberhasilan pada pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a) Budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan pada *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- c) Manajemen pengendalian risiko pada perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.

- d) Sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamikan perusahaan dari waktu ke waktu.

2) Faktor Eksternal Faktor eksternal

Beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi sebuah keberhasilan pada penerapan *Good Corporate Governance* diantaranya:

- a) Sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
- c) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan profesional.
- d) Sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *Good Corporate Governance* secara sukarela.
- e) Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen yaitu pihak yang mempunyai kedudukan penting dalam upaya memberikan laporan keuangan yang reliabel. Besarnya jumlah komisaris independen akan membuat meningkatnya peran mereka dalam pengawasan dan mengontrol tindakan manajemen. Menurut D. Sari, (2014) dalam penelitiannya mengatakan sesungguhnya komisaris independen mempunyai pengaruh positif pada manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

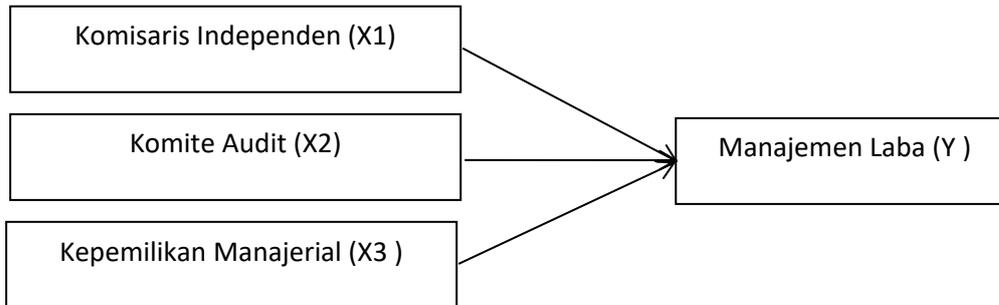
Komite audit mempunyai tugas pengawasan serta pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan hasil dari bentukan dari dewan komisaris (Guna & Herawaty, 2010). Komite audit melakukan pengawasan serta pengelolaan pada akuntansi perusahaan. Peran komite audit dalam perusahaan mampu memperbaiki kinerja dalam perusahaan. Komite audit mempunyai pengaruh positif pada manajemen laba (Abdillah et al, 2014)

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang secara individu dimiliki pihak manajemen beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial di percayai mampu membatasi kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Besarnya kepemilikan mampu meminimalisir kegiatan manajemen laba yang merupakan salah satu masalah keagenan (Abdillah et al, 2014). Dalam penelitian (Suaidah & Utomo, 2018) menjelaskan jika kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif pada manajemen laba. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif pada manajemen laba (Abdillah et al, 2014)

2.4 KerangkaKonseptual

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti menyajikan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 KerangkaKonseptual

2.5 HipotesisPenelitian

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut

- H 1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba
- H 2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba
- H 3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba